

**KERANGKA ACUAN KERJA
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Karanganyar serta target-target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/*output* dan hasil/*outcome*) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari kegiatan dibanding dengan pilihan lainnya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan dan kenyataan". Hal yang sangat dipentingkan dalam semua kegiatan evaluasi adalah kesempurnaan dan keakuratan data. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi, sebagai upaya menuju organisasi berkinerja tinggi.

Guna mendukung tercapainya target RPD Urusan pengawasan dan RENSTRA Inspektorat Daerah, diperlukan pembahasan dan evaluasi yang menyeluruh terkait proses pelaksanaan program kegiatan di Inspektorat Daerah dengan harapan program kegiatan yang akan direncanakan di tahun berikutnya akan lebih baik dan berdampak positif terhadap pemenuhan target yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.
- e. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- f. Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

C. TUJUAN KEGIATAN

Penyusunan PKPT Tahun 2024 bertujuan:

1. Terpenuhinya Standar Audit Intern khususnya penyusunan perencanaan Pengawasan Intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Terwujudnya prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan ketepatan ruang lingkup pengawasan (audit).

D. ORGANISASI KEGIATAN

1. Perangkat Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
3. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
4. Sub kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
5. Pekerjaan : Pengadaan bahan pakai habis, pelaksanaan perjalanan dinas.
6. Indikator Keluaran : Tersusunnya PKPT Tahun Anggaran 2024.
7. Tahun Anggaran : 2024
8. Pengguna Anggaran : Zulfikar Hadidh, S.H.

9. PPTK : Nurul Badriyah, SE.
10. Bendahara Pengeluaran : Endang Yuniati, S.Ak

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini mencakup:

1. Pembentukan Tim Penyusun PKPT.
2. Pengumpulan data. Dalam tahap ini Tim Penyusun melakukan pengumpulan data pengawasan sebagai acuan menentukan/memvalidasi/ memperbaharui *Audit Universe*. *Audit Universe* adalah peta komprehensif tentang daftar sasaran pengawasan dan berbagai variabel terkait sasaran pengawasan, menyangkut kepentingan pengawasan intern yang dibangun oleh auditor berkenaan dengan seluruh proses pengawasan intern dan sesuai dengan tujuan pengawasan intern. *Audit Universe* yang dimaksud merupakan satuan kerja yang diurutkan sesuai dengan prioritas risikonya. Pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang dapat dijadikan acuan dalam penentuan penentuan/pemilihan satuan kerja (*auditable units*) melalui faktor-faktor dan profil risiko.
3. Pemilihan sasaran pengawasan (*auditable units*).
4. Penentuan jenis, cakupan, lama, waktu dan tujuan pengawasan intern yang akan dilakukan.
5. Penentuan perkiraan kebutuhan sumber daya pengawasan dan alokasi sumber daya pengawasan yang tersedia (anggaran biaya dan SDM).
6. Penetapan PKPT Tahun Anggaran 2024.

F. LOKASI KEGIATAN

Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

G. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dengan kode rekening 6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan total nilai pagu anggaran Rp 44.723.700,00 (Empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga tujuh ratus rupiah).

H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) bulan.

I. METODOLOGI PELAKSANAAN

1. Kegiatan penyusunan PKPT Tahun Anggaran 2024 menggunakan metode:
2. *Focus Group Discussion* (FGD);

3. Rapat Pleno.

J. JADWAL KEGIATAN

Terlampir.

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Tahun Anggaran 2024 disusun untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

**JADWAL KEGIATAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian Aktivitas	Waktu Pelaksanaan						PIC	Keluaran	Keterangan	Metodologi
		Mgg IV Nop'24	Mgg IV Nop'24	Mgg I Des'24	Mgg II Des'24	Mgg III Des'24	Mgg IV Des'24				
1.	Pembentukan Tim Penyusun.							Sub Bag. Perencanaan	SK Inspektur tentang Pembentukan Tim Penyusun PKPT Tahun Anggaran 2024.	-	-
2.	Pengumpulan data untuk bahan memperbaharui <i>Audit Universe</i> .							Tim Penyusun	1. Data faktor risiko OPD dan Desa; 2. Profil risiko/Register Risiko OPD.	Pengumpulan data dilakukan oleh Tim Penyusun sesuai wilayah Irban masing-masing.	FGD, korespondensi
3.	Menentukan/memvalidasi/memperbaharui <i>Audit Universe</i> .								<i>Audit Universe</i> yang telah diperbaharui.	<i>Audit Universe</i> dilakukan pembaharuan oleh Tim Penyusun sesuai wilayah Irban masing-masing.	FGD, korespondensi

3.	Pemilihan sasaran pengawasan (<i>auditable units</i>).							Tim Penyusun	Daftar <i>auditable units</i> .	Daftar <i>auditable units</i> dibuat oleh Tim Penyusun sesuai wilayah Irban masing-masing.	FGD, korespondensi
4.	Penentuan jenis, cakupan, lama, waktu dan tujuan pengawasan intern yang akan dilakukan.							Tim Penyusun	Daftar Informasi tentang jenis, cakupan, lama, waktu dan tujuan pengawasan untuk setiap sasaran pengawasan (<i>auditable units</i>).	Dibuat oleh Tim Penyusun sesuai wilayah Irban masing-masing.	FGD
5.	Penentuan perkiraan kebutuhan sumber daya pengawasan dan alokasi sumber daya pengawasan yang tersedia (anggaran biaya dan SDM)							Tim Penyusun	Daftar Informasi tentang perkiraan kebutuhan sumber daya pengawasan dan alokasi sumber daya pengawasan yang tersedia (anggaran biaya dan SDM).	Dibuat oleh Tim Penyusun sesuai wilayah Irban masing-masing.	FGD

6.	Proses desk/verifikasi kelengkapan dokumen dan data, isian kertas kerja pembaharuan <i>audit universe</i> dan <i>auditable units</i> .							Sub Bag. Perencanaan	Isian kertas kerja pembaharuan audit universe dan auditable units yang telah diverifikasi.	-	Verifikasi
7.	Rapat Pleno untuk Finalisasi Draf PKPT Tahun Anggaran 2024.							Sub Bag. Perencanaan	Draf final PKPT Tahun Anggaran 2024 .	-	Rapat Pleno
8.	Penetapan PKPT Tahun Anggaran 2024							Sub Bag. Perencanaan	Keputusan Bupati Karanganyar tentang Penetapan PKPT Tahun Anggaran 2024	-	-